**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah, merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya bangsa, yang berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi dan lapangan kerja, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha Kepariwisataaan yang diselenggarakan di daerah;
 - c. bahwa terib penyelenggaraan kepariwisataan perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pendapatan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Kepariwisataaan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Daerah adalah Dinas atau dapat pula unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang diberi tugas pokok dan tanggung jawab secara teknis operasional untuk mengelola kewenangan-kewenangan Pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan pelayanan kepariwisataan.
9. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang usaha tersebut.

/10. Jasa

10. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama wisata.
11. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
12. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
13. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
14. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
15. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
16. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
17. Pramuwisata (guide) adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
18. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran harian.
19. Jasa Boga/Katering adalah suatu usaha yang menjadikan tempat, dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan paling kurang 15 (lima belas) orang.
20. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah suatu tempat yang diperuntukkan sebagai sarana usaha kepariwisataan, yang memiliki, menyediakan dan menawarkan keindahan alam, nilai sejarah dan purbakala, flora dan fauna, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas akomodasi serta restoran/rumah makan.
22. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani, yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
23. Arena Bermain adalah suatu yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, peralatan manual dan fasilitas untuk permainan ketangkasan (termasuk play station) atau kesenangan, yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat menyediakan restoran/rumahmakan.
24. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Permandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas, air terjun, pantai dan atau sumber air sebagai usaha pokok serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

26. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Arena Kebugaran (fitness centre) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat perlengkapan, instruktur olah gerak dan fasilitasi lain yang bersifat penunjang untuk kegiatan olah gerak atau senam.
28. Tempat kesenian adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan kesenian/hiburan tradisional serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
29. Panti pijat (massage) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Bola Sodok (Bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Klub Malam (Night Club) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa, penyediaan makan dan minum.
33. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan memutar film dan fasilitas untuk pemutar film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

1. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
2. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
3. memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
4. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran produksi nasional.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan dan mengatur bentuk penyelenggaraan usaha kepariwisataan di daerah, berdasarkan penggolongan sebagai berikut :

1. Usaha Jasa Pariwisata, berupa usaha :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - e. Jasa Impresariat;
 - f. Jasa Konsultasi Pariwisata;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.

2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari :
 - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
3. Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum;
 - c. Usaha Angkutan Wisata;
 - d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta; dan
 - e. Usaha Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata.

Pasal 5

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengelola usaha sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. mentaati ketentuan perjanjian kerja, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta jaminan sosial bagi pekerja;
 - c. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan serta kondisi sosial budaya masyarakat;
 - e. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam lingkungan usaha kepariwisataan;
 - f. menjamin keselamatan, kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran atau kerusakan;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta perbuatan yang melanggar kesusilaan serta tindakan kemaksiatan lainnya.
- (2) Pengelola usaha kepariwisataan dilarang untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja di bawah umur tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha pariwisata tertentu;
 - c. menampilkan pekerja-pekerja dengan pakaian/busana yang tidak sesuai dengan etika atau kesusilaan.

BAB IV

JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, meliputi :
 - a. Taman Rekreasi;
 - b. Permandian Alam;
 - c. Kolam Memancing;
 - d. Wisata Bahari;
 - e. Wisata Budaya/Sejarah.
- (2) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, meliputi :
 - a. Pondok Wisata;
 - b. Jasa Boga/Katering;